



# RENCANA KERJA TAHUN 2023



# DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022



## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| DAFTAR ISI.....  | 2  |
| DAFTAR TABEL.....  | 3  |
| KATA PENGANTAR.....  | 4  |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 5  |
| 1.1. LATAR BELAKANG.....   | 5  |
| 1.2. LANDASAN HUKUM.....   | 5  |
| 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....  | 6  |
| 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....  | 7  |
| BAB II.....  | 9  |
| HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....  | 9  |
| 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN<br>CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH..... | 9  |
| 2.2. ANALIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....  | 13 |
| 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT<br>DAERAH.....                           | 14 |
| a. Analisis Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan.....  | 15 |
| b. Analisis Lingkungan Internal.....   | 15 |
| c. Analisis Lingkungan Eksternal.....  | 16 |
| 2.4. Telaah Terhadap Terhadap Rancangan Awal RKPD.....   | 17 |
| BAB III.....   | 57 |
| TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETENAGAKERJAAN.....  | 57 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....   | 57 |
| BAB IV.....  | 60 |
| RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETENAGAKERJAAN.....   | 60 |
| BAB V.....   | 74 |
| PENUTUP.....   | 74 |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1 Tujuan dan Sasaran 2023-2026 .....  | 9  |
| Tabel 2 Evaluasi dan Realisasi, September 2022.....                                 | 9  |
| Tabel 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan .....   | 13 |
| Tabel 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....                         | 19 |
| Tabel 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023 ..... | 59 |
| Tabel 6 Tabel Kebutuhan Anggaran 2023-2026.....                                     | 60 |
| Tabel 7 Rencana Kerja 2023.....   | 62 |

## KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Tahun 2023 s/d 2026.

Rencana Kerja (Renja) merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai.

Dalam penyusunan Renja ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renja Dinas menuju Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi yang responsive dan aspiratif.

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KABUPATEN BEKASI**

**Drs. H. EDI ROCHYADI, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 196409061986031012

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menuangkan langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selain itu Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan salah satu dokumen yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

- a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- b. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6)
- h. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 84);

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Dinas Ketenagakerjaan merupakan Perangkat Daerah (PD) dan berkewajiban untuk membuat Renja PD untuk Periode 1 Tahun ( 2023 ) yang merupakan tahun ke-13, dan memuat tentang Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Program serta Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi serta berpedoman kepada RPD dan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2020-2026.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dan semakin berubah dengan akselerasi yang tinggi dan kompleks sebagai akibat adanya globalisasi seperti dewasa ini, maka Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi secara kontinyu melakukan perubahan – perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan, konsistensi, dan berkelanjutan, sehingga dapat optimal dalam melakukan kinerja yang berorientasi kepada Pembangunan Masyarakat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi yang berwawasan

lingkungan dan tentunya tidak terlepas dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi.

Agar tugas pokok dan fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis yang secara hirarkis akan menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Perencanaan kerja sangat penting bagi upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan karena hal yang akan diungkapkan dalam Rencana Kerja (Renja) pada dasarnya adalah apakah indikator sasaran (outcomes) pada setiap kegiatan akan dapat mendukung pencapaian sasaran atau apakah outcomes sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Apabila sudah sesuai maka langkah selanjutnya adalah penetapan besarnya target sasaran dan anggaran yang diperlukan pada tahun berjalan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETENAGAKERJAAN**

Bab ini memuat uraian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, dan perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta penjelasan mengenai program dan kegiatan Tahun Rencana (Tahun 2023).

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETENAGAKERJAAN**

Pada bagian ini dikemukakan Rencana Kerja berupa rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

### **BAB V. PENUTUP**

Dalam Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam rencana jangka waktu 4 tahun yaitu tahun 2023-2026, dan pada tahun pertama (2023), telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai program dalam pembangunan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis serta program yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-1) dan tahun 2023 yaitu sebagaimana berikut : Tahun 2023, Programnya terdiri dari :

**Tabel 1 Tujuan dan Sasaran 2023-2026**

| Tujuan                                       | Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran                  | Target kinerja Tujuan/sasaran pada tahun |        |        |        |
|--|---|---|--|--------|--------|--------|
|  |   |   | 2023                                     | 2024   | 2025   | 2026   |
| Meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja | Peningkatan Daya saing tenaga kerja dan iklim ketenagakerjaan | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 66.00%                                   | 66.10% | 66.20% | 66.30% |

**Tabel 2 Evaluasi dan Realisasi, September 2022**

| KODE         | PD                    | PROG   | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | JML | KETERANGAN / TARGET KINERJA | satuan | TARGET PENARIKAN DANA BULAN per Tanggal 16 September 2022 SESUAI ANGGARAN KAS |          |            |         |
|--------------|-----------------------|--|----------|--------------|-----|-----------------------------|--------|---|----------|------------|---------|
|              |                       |  |          |              |     |                             |        | ANGGARAN  | KEUANGAN | % KEUANGAN | % FISIK |
| 1            |                       |  |          | 2            |     | 3                           |        | 7   | 14       | 15         | 16      |
| 2.07.01      | DINAS KETENAGAKERJAAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |          |              |     |                             |        |   |          |            |         |
| 2.07.01.2.01 |                       | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |          |              |     |                             |        |   |          |            |         |

|                 |                       |  |       |       |         |                |               |     |      |
|-----------------|-----------------------|--|-------|-------|---------|----------------|---------------|-----|------|
| 2.07.01.2.01.03 |                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 1     | 1     | Dokumen | 136,830,000    | 85,207,000    | 62% | 100% |
| 2.07.01.2.01.06 |                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD                               | 6     | 9     | Dokumen | 98,570,000     | 72,179,350    | 73% | 67%  |
| 2.07.01.2.06    |                       | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |       |       |         |                |               |     |      |
| 2.07.01.2.06.02 |                       | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |       |       |         | 589,239,665    | 402,233,000   | 68% |      |
| 2.07.01.2.06.04 |                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   |       |       |         | 172,900,000    | 101,789,000   | 59% |      |
| 2.07.01.2.06.09 |                       | Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |       |       |         | 421,155,000    | 93,840,000    | 22% |      |
| 2.07.01.2.06.10 |                       | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |       |       |         | 95,028,579     | 18,746,000    | 20% |      |
| 2.07.01.2.05    |                       | <b>Administrasi Kepegawaian Daerah</b>   |       |       |         |                |               |     |      |
| 2.07.01.2.05.09 |                       | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | 130   | 130   | Orang   | 455,000,000    | 436,150,000   | 96% | 100% |
| 2.07.01.2.08    |                       | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |       |       |         |                |               |     |      |
| 2.07.01.2.08.04 |                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |       |       |         | 495,920,000    | 203,590,000   | 41% | -    |
| 2.07.01.2.09    |                       | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                               |       |       |         |                |               |     |      |
| 2.07.01.2.09.01 |                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas |       |       |         | 143,000,000    | 48,902,000    | 34% | -    |
| 2.07.01.2.09.10 |                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         |       |       |         | 60,120,000     | 12,200,000    | 20% | -    |
| 2.07.01.2.02    |                       | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |       |       |         |                |               |     |      |
| 2.07.01.2.02.01 |                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 57    | 57    | Orang   | 14,238,642,000 | 8,656,963,312 | 61% | 100% |
| 2.07.01.2.02.07 |                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD                                | 0     | 5     | Dokumen | 150,000,000    | 38,406,000    | 26% | 0%   |
| 2.07.04         | DINAS KETENAGAKERJAAN | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>   |       |       |         |                |               |     |      |
| 2.07.04.2.01    |                       | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota  |       |       |         |                |               |     |      |
| 2.07.04.2.01.02 |                       | Pelayanan Antar Kerja  | 25703 | 15000 | Orang   | 283,854,000    | 173,895,000   | 61% | 171% |

|                 |  |  |     |     |            |               |             |        |        |
|-----------------|--|--|-----|-----|------------|---------------|-------------|--------|--------|
| 2.07.04.2.01.01 |  | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja   | 120 | 120 | Orang      | 168,892,000   | 143,000,000 | 85%    | 100%   |
| 2.07.04.2.01.03 |  | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja  | 120 | 120 | Orang      | 338,474,000   | 138,600,000 | 41%    | 100%   |
| 2.07.04.2.04    |  | <b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                 |     |     |            |               |             |        |        |
| 2.07.04.2.04.01 |  | Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia      | 197 | 170 | Orang      | 197,495,000   | 117,611,000 | 60%    | 116%   |
| 2.07.04.2.05    |  | <b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                 |     |     |            |               |             |        |        |
| 2.07.04.2.05.01 |  | Koordinasi dan Sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota       |     | 210 | Perusahaan | 519,606,733   | 213,550,600 | 41%    | 0%     |
| 2.07.04.2.03    |  | <b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>   |     |     |            |               |             |        |        |
| 2.07.04.2.03.01 |  | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online   |     | 1   | Aplikasi   | 200,000,000   | 57,800,000  | 29%    | -      |
| 2.07.04.2.03.02 |  | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online  |     | 130 | Pengguna   | 250,000,000   | 7,950,000   | 3%     | -      |
| 2.07.03         |  | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>  |     |     |            |               |             |        |        |
| 2.07.03.2.01    |  | <b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>   |     |     |            |               |             |        |        |
| 2.07.03.2.01.01 |  | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 198 | 378 | Orang      | 1,599,324,435 | 757,529,386 | 47.37% | 52.38% |
| 2.07.03.2.02    |  | <b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>  |     |     |            |               |             |        |        |
| 2.07.03.2.02.01 |  | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta   |     | 2   | laporan    | 376,663,686   | 157,881,000 | 41.92% | -      |
| 2.07.03.2.04    |  | <b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>  |     |     |            |               |             |        |        |
| 2.07.03.2.04.01 |  | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil   | 100 | 150 | Perusahaan | 300,000,000   | 191,850,000 | 64%    | 67%    |
| 2.07.03.2.05    |  | <b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  |     |     |            |               |             |        |        |
| 2.07.03.2.05.01 |  | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga kerja   |     | 100 | Orang      | 350,000,000   | 48,000,000  | 14%    |        |
| 2.07.05         |  | <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>   |     |     |            |               |             |        |        |

DINAS KETENAGAKERJAAN

|                 |  |  |  |     |     |           |               |               |        |       |
|-----------------|--|--|--|-----|-----|-----------|---------------|---------------|--------|-------|
| 2.07.05.2.02    |  |  | <b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah</b>  |     |     |           |               |               |        |       |
| 2.07.05.2.02.04 |  |  | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota  | 2   | 12  | Laporan   | 1,033,370,000 | 586,914,200   | 56.80% | 17%   |
| 2.07.05.2.02.02 |  |  | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 25  | 100 | Persen    | 255,300,000   | 153,960,000   | 60%    | 25%   |
| 2.07.05.2.02.01 |  |  | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 3   | 3   | Laporan   | 291,972,000   | 267,435,200   | 92%    | 100%  |
| 2.07.05.2.01    |  |  | <b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi di Daerah Kabupaten/Kota</b>                  |     |     |           |               |               |        |       |
| 2.07.05.2.01.01 |  |  | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan  |     | 200 | Peraturan | 102,120,000   | 40,620,000    | 39.78% | 0.00% |
| 3.32.03         |  |  | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI</b>  |     |     |           |               |               |        |       |
| 3.32.03.2.01    |  |  | <b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  |     |     |           |               |               |        |       |
| 3.32.03.2.01.01 |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 Kabupaten/ Kota   | 1   | 1   | laporan   | 322,600,000   | 115,780,000   | 36%    | 100%  |
| 3.32.03.2.01.05 |  |  | Penyuluhan Transmigrasi  | 100 | 100 | Orang     | 52,400,000    | 49,618,000    | 95%    | 100%  |
| 3.32.03.2.01.04 |  |  | Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota  | 0   | 10  | Orang     | 75,000,000    |               | 0.00%  | 0%    |
| 2.07.03         |  |  | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>  |     |     |           |               |               |        |       |
| 2.07.03.2.01    |  |  | <b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>   |     |     |           |               |               |        |       |
| 2.07.03.2.01.01 |  |  | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi   | 144 | 144 | Orang     | 2,401,784,200 | 1,496,794,700 | 62.32% | 100%  |
| 2.07.03.2.01.02 |  |  | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten /Kota   | 6   | 6   | Jenis     | 847,662,850   | 663,098,000   | 78.23% | 100%  |
| 2.07.01         |  |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN KABUPATEN/KOTA</b>   |     |     |           |               |               |        |       |

DINAS KETENAGAKERJAAN

DINAS KETENAGAKERJAAN

|                 |  |  |    |    |        |             |             |        |      |
|-----------------|--|--|----|----|--------|-------------|-------------|--------|------|
| 2.07.01.2.06    |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    |    |    |        |             |             |        |      |
| 2.07.01.2.06.02 |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 4  | 4  | Bahan  | 442,558,800 | 425,419,300 | 96.13% | 100% |
| 2.07.01.2.06.04 |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 4  | 4  | Bahan  | 3,218,700   |             | 0.00%  | 100% |
|                 |  |  |    |    |        |             |             |        |      |
| 2.07.01.2.08    |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |    |    |        |             |             |        |      |
| 2.07.01.2.08.02 |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 26 | 26 | Orang  | 216,000,000 | 24,287,400  | 11.24% | 100% |
| 2.07.01.2.08.04 |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 8  | 12 | Bulan  | 925,920,000 | 499,013,940 | 53.89% | 67%  |
|                 |  |  |    |    |        |             |             |        |      |
| 2.07.01.2.09    |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |    |    |        |             |             |        |      |
| 2.07.01.2.09.06 |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     | 3  | 3  | Jenis  | 23,270,000  | 1,000,000   | 4.30%  | 100% |
| 2.07.01.2.09.09 |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                 | 2  | 2  | Gedung | 220,304,796 | 218,530,200 | 99.19% | 100% |

## 2.2. ANALIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bukan hanya untuk menciptakan kesempatan kerja, tetapi juga untuk mengakomodasi kelangsungan bekerja, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh, serta kelangsungan usaha yang berkesinambungan. Sejumlah tantangan dan peluang ketenagakerjaan yang ada saat ini, antara lain, pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, angka pengangguran yang masih tinggi, perlunya pembangunan SDM yang berkualitas, dan perkembangan ekonomi digital dan tren teknologi yang mengubah lanskap bisnis ke depan, sehingga mempengaruhi peta kebutuhan tenaga kerja dan perubahan pola hubungan kerja yang semakin dinamis. UU Cipta Kerja juga bertujuan menyelesaikan tantangan ketenagakerjaan lainnya, seperti bonus demografi, di mana sebagian besar penduduknya berusia produktif atau usia kerja, dan dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan.

Jumlah perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi yang banyak menjadikan peluang di sektor tenaga kerja dan pendapatan daerah dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing sehingga mampu meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan yang lebih baik untuk para tenaga kerja.

**Tabel 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK  | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke |          |          |          |          | Realisasi Capaian Tahun ke |          |          |          |          |
|----|--|-------------|---|--|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
|    |  |             |   | 1  | 2        | 3        | 4        | 5        | 1                          | 2        | 3        | 4        | 5        |
| 1  | Angka tingkat pengangguran terbuka                         | N/A         | Angka tingkat pengangguran terbuka                    | 9,53                                     | 9,03     | 8,53     | 8,03     | 7,53     | 10,97                      | 9,69     | 9,00     | 11,54    | 10,09    |
| 2  | Presentase lembaga ketenagakerjaan yang terakreditasi      | N/A         | Presentase lembaga ketenagakerjaan yang terakreditasi | 100%                                     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%                       | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |
| 3  | Angka tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)            | N/A         | Angka tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)       | 63,87                                    | 64,57    | 65,27    | 65,97    | 66,67    | 61,26                      | 61,46    | 67,33    | 64,23    | N/A      |
| 4  | Jumlah kaum difabel yang mendapatkan pekerjaan             | N/A         | Jumlah kaum difabel yang mendapatkan pekerjaan        | 45 orang                                 | 45 orang | 45 orang | 45 orang | 45 orang | 45 orang                   | 45 orang | 45 orang | 45 orang | 45 orang |
| 5  | Jumlah perselisihan di perusahaan                          | N/A         | Jumlah perselisihan di perusahaan                     | 350                                      | 400      | 450      | 500      | 550      | 234                        | 225      | 286      | 230      | N/A      |
| 6  | Rekomendasi kepala daerah ttg UMK                          | N/A         | Rekomendasi kepala daerah ttg UMK                     | 1 rek                                    | 1 rek    | 1 rek    | 1 rek    | 1 rek    | 1 rek                      | 1 rek    | 1 rek    | 1 rek    | 1 rek    |

### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang ada serta mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan maka dapat dirumuskan isu strategis, sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pembekalan kepada pencari kerja
2. Perlu diberikan pengetahuan tentang kewirausahaan
3. Perlu ditingkatkan penanganan kasus ketenagakerjaan secara terkoordinir dan berkesinambungan.

4. Perlu penambahannya pengawasan ketenagakerjaan yang seimbang dengan jumlah objek pengawasan.
5. Perlu diadakan koordinasi yang efektif antara pengawasan ketenagakerjaan dengan mediator, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta pihak keamanan.
6. Perlu peran optimalisasi Forum Pengurangan Pengangguran.
7. Perlu diadakan bursa kerja online sebagai media informasi lowongan kerja.
8. Perlu adanya sosialisasi hubungan industrial yang harmonis.
9. Perlu Pemagangan dalam negeri dan luar negeri.
10. Perlu Optimalisasi Pengembangan UPTD Balai Latihan Kerja.
11. Perlu penambahan jumlah SDM Mediator agar seimbang dengan jumlah kasus.
12. Perlu inovasi pelayanan berbasis online untuk mempermudah layanan ketenagakerjaan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi

**a. Analisis Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan**

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk membantu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketenagakerjaan.

**b. Analisis Lingkungan Internal**

Perkembangan teknologi informasi, dinamika sosial, politik dan ekonomi telah membawa perubahan yang sangat luas dan mendasar terhadap kehidupan kemasyarakatan sehari-hari. Perubahan lingkungan organisasi ini harus direspon secara bijaksana. Dalam tataran pemerintahan, perubahan kelembagaan adalah hal yang tidak dapat dihindari, terjadi penataan isu-isu strategis, pengelompokan ulang pekerjaan, demikian juga dengan kewenangan yang melekat pada institusi tersebut. Dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan, sejak era reformasi telah mengalami beberapa kali perubahan kelembagaan.

Sejak Otonomi Daerah diberlakukan, kelembagaan Dinas Ketenagakerjaan tidak banyak mengalami perubahan, namun hanya mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan aturan perundangan. Perubahan terjadi dalam lingkup pekerjaan yang semakin luas dan bertambahnya kewenangan baru sejalan dengan dinamika permasalahan yang dihadapi dalam bidang ketenagakerjaan. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan ini menuntut kapasitas aparat untuk mengatasinya. Dengan kondisi SDM saat ini maka kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur mutlak diperlukan.

Uraian di atas merupakan kekuatan dan institusi Dinas Tenaga Kerja, sedangkan pada sisi yang lain, Dinas Ketenagakerjaan perlu adanya penambahan aparatur yang berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tercipta ketidak seimbangan antara beban kerja (sesuai tupoksi dan kewenangan), dengan potensi sumber daya aparatur yang ada.

Hal-hal tersebut tentunya juga berkaitan dengan dengan karakteristik wilayah dan penduduk Kabupaten Bekasi. Di lihat dan letak geografis, Kabupaten Bekasi pada sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa; sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, sebelah Barat berbatasan dengan Kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor. Dengan luas wilayah sebesar +1- 127.388 Ha, yang terbagi dalam 23 kecamatan, dan terdiri dari 7 kelurahan dan 180 desa, serta jumlah penduduk 3.256.000 jiwa. Ditambah lagi dengan karakteristik penduduk Kabupaten Bekasi yang sangat heterogen. Kedua aspek tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi institusi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, dengan segala kemampuan yang ada.

#### **c. Analisis Lingkungan Eksternal**

Perubahan di bidang sosial, politik dan ekonomi serta era keterbukaan (globalisasi) ditandai dengan semakin tingginya minat dan perhatian masyarakat untuk mendirikan usaha dan berinvestasi. Selain itu juga gencarnya pemerintah untuk menarik investor berinvestasi ke Indonesia merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk terlibat. Pemerintah daerah dapat berperan untuk memberi pelayanan pada investor untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan sebagai trigger pembangunan ekonomi daerah, sedang masyarakat dapat memanfaatkan untuk ikut terlibat dalam proses produksi. Peran Dinas Ketenagakerjaan amat penting, baik sebagai regulator maupun sebagai mediator antara investor dengan masyarakat.

Seiring dengan dinamika itu, pada tingkat aktualisasinya masih terdapat beberapa hal yang merupakan permasalahan dan membutuhkan penanganan secara sungguh-sungguh. Terdapat kecenderungan potensi yang dapat berdampak pada dinamika permasalahan tenaga kerja, antara lain:

1. Menguatnya kesadaran hak para pekerja (tenaga kerja) yang bermuara pada timbulnya aksi demo dan mogok massal.



2. Kesenjangan antara penyerapan Ketenagakerjaan dari luar daerah dan luar negeri dapat menimbulkan keresahan yang dapat menciptakan ketidakstabilan iklim berusaha di Kabupaten Bekasi
3. Terdapat kecenderungan bergesernya nilai-nilai budaya yang bersifat kekeluargaan /gotong royong, menjadi bersifat individualis bahkan mengarah kepada sifat anarkis. Hal tersebut juga memiliki peluang berdampak pada melemahnya rasa menghargai terhadap nilai-nilai kebangsaan.
4. Kecepatan perubahan teknologi seringkali tidak diimbangi kecepatan Ketenagakerjaan menyesuaikan dengan perubahan tersebut, apabila hal ini tidak diantisipasi akan semakin memperlemah daya saing Ketenagakerjaan lokal.

Banyaknya perusahaan dan pabrik di Kabupaten Bekasi, dimana dalam operasionalnya mempekerjakan warga asing, namun disebabkan keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, kalangan asing tersebut tidak optimal dalam memperoleh pengawasan.

#### **2.4. Telaah Terhadap Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Sesuai dengan rancangan awal dan prioritas pembangunan daerah pada RPD Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 disebutkan bahwa terdapat 2 (Dua) Tujuan dan Sasaran Daerah :

1. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah.
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan.

Dengan sasaran Dinas Ketenagakerjaan Meningkatnya daya saing dan kesempatan kerja dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbukanya.



**Tabel 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**

| Tujuan  | Sasaran | Kode Program, Kode Kegiatan dan Kode Subkegiatan | Program, Kegiatan dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program        | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |        |              |        |              |        |     |
|---|---------|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|-----|
|   |         |  |                                   |   |                                       |                       |   | 2023                                  |              | 2024   |              | 2025   |              | 2026   |     |
|   |         |  |                                   |   |                                       |                       |   | Target                                | Rp.          | Target | Rp.          | Target | Rp.          | Target | Rp. |
| Meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja                  |         |  |                                   | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)        |                                       |                       | 10,09   | 9,40 Persen                           | 9,02 Persen  |        | 8,64 Persen  |        | 8,26 Persen  |        |     |
| Peningkatan Daya saing tenaga kerja dan iklim ketenagakerjaan |         |  |                                   | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) |                                       |                       | N/A   | 66,00 Persen                          | 66,10 Persen |        | 66,20 Persen |        | 66,30 Persen |        |     |

|  |  |              |  |  |   |  |     |            |  |            |  |            |  |            |  |
|--|--|--------------|--|--|---|--|-----|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|
|  |  | 2.07.03      | PROGRAM PELATIHAN<br>KERJA DAN PRODUKTIVITAS<br>TENAGA KERJA | Persentase<br>Pencari Kerja<br>yang<br>mendapatkan<br>Pelatihan            |   |  | N/A | 100 Persen |  | 100 Persen |  | 100 Persen |  | 100 Persen |  |
|  |  |              |  | Persentase<br>pelatihan<br>angkatan kerja<br>berbasis<br>kompetensi        |   |  | N/A | 10 Persen  |  | 20 Persen  |  | 30 Persen  |  | 40 Persen  |  |
|  |  |              |  | Persentase<br>Perusahaan<br>kecil yang<br>ditingkatkan<br>produktivitasnya |   |  | N/A | 50 Persen  |  | 60 Persen  |  | 70 Persen  |  | 80 Persen  |  |
|  |  | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan<br>berdasarkan Unit Kompetensi         |  | Keluaran :<br>Jumlah Pencari<br>Kerja yang<br>mendapatkan<br>Sertifikasi<br>Kompetensi<br>(Dinas) |  | N/A | 50 Orang   |  | 60 Orang   |  | 70 Orang   |  | 80 Orang   |  |

|  |  |  |  |  |  |  |     |           |  |           |  |           |  |           |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
|  |  |  |  |  | Keluaran :<br>Jumlah Pencari<br>Kerja yang<br>mendapatkan<br>pelatihan<br>(Dinas)              |  | N/A | 50 Orang  |  | 60 Orang  |  | 70 Orang  |  | 80 Orang  |  |
|  |  |  |  |  | Keluaran :<br>Jumlah Pencari<br>Kerja yang<br>mendapatkan<br>pelatihan (UPTD<br>BLK)           |  | N/A | 224 Orang |  | 256 Orang |  | 288 Orang |  | 320 Orang |  |
|  |  |  |  |  | Keluaran :<br>Jumlah sarana<br>dan prasarana<br>pelatihan Balai<br>Latihan Kerja<br>(UPTD BLK) |  | N/A | 4 Unit    |  | 5 Unit    |  | 6 Unit    |  | 6 Unit    |  |

|  |  |  |  |  |   |  |     |            |  |            |  |            |  |            |  |
|--|--|--|--|--|---|--|-----|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|
|  |  |  |  |  | Hasil :<br>Persentase<br>Pencari Kerja<br>yang<br>mendapatkan<br>Sertifikasi<br>Kompetensi<br>(Dinas) |  | N/A | 100 Persen |  | 100 Persen |  | 100 Persen |  | 100 Persen |  |
|  |  |  |  |  | Hasil :<br>Persentase<br>Pencari Kerja<br>yang<br>mendapatkan<br>pelatihan;<br>(Dinas)                |  | N/A | 100 Persen |  | 100 Persen |  | 100 Persen |  | 100 Persen |  |
|  |  |  |  |  | Hasil :<br>Persentase<br>Pencari Kerja<br>yang<br>mendapatkan<br>pelatihan;<br>(UPTD BLK)             |  | N/A | 100 Persen |  | 100 Persen |  | 100 Persen |  | 100 Persen |  |



|  |  |              |  |  |                                      |  |     |        |  |        |  |        |  |        |  |
|--|--|--------------|--|--|--------------------------------------|--|-----|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
|  |  | 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta |  | Keluaran :<br>Jumlah LPK yang dibina |  | N/A | 50 LPK |  | 60 LPK |  | 70 LPK |  | 80 LPK |  |
|--|--|--------------|--|--|--------------------------------------|--|-----|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|



|  |  |  |  |  |   |  |     |          |  |          |  |          |  |          |  |
|--|--|--|--|--|---|--|-----|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
|  |  |  |  |  | Keluaran :<br>Jumlah Pencari<br>Kerja yang<br>dimagangkan |  | N/A | 20 Orang |  | 25 Orang |  | 30 Orang |  | 35 Orang |  |
|--|--|--|--|--|---|--|-----|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|

|  |  |                 |   |  |  |  |     |            |               |            |             |            |             |            |             |
|--|--|-----------------|---|--|--|--|-----|------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|  |  |                 |   |  | Hasil :<br>Persentase LPK<br>Terakreditasi                 |  | N/A | 1 Persen   |               | 1 Persen   |             | 1 Persen   |             | 1 Persen   |             |
|  |  | 2.07.03.2.02.01 | Pembinaan Lembaga Pelatihan<br>Kerja Swasta |  | Jumlah Lembaga<br>Pelatihan Kerja<br>Swasta yang<br>Dibina |  | N/A | 50 Lembaga | 1,500,000,000 | 60 Lembaga | 750,000,000 | 70 Lembaga | 770,000,000 | 80 Lembaga | 780,000,000 |

|  |  |                 |  |  |   |  |     |  |  |  |  |             |             |             |             |
|--|--|-----------------|--|--|---|--|-----|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | 2.07.03.2.03    | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja                            |  | Keluaran :<br>Jumlah<br>Penerbitan Izin<br>yang terintegrasi                            |  | N/A |  |  |  |  | 1 Perijinan |             | 1 Perijinan |             |
|  |  |                 |  |  | Hasil :<br>Persentase<br>Jumlah Perijinan<br>yang terintegrasi                          |  | N/A |  |  |  |  | 10 Persen   |             | 10 Persen   |             |
|  |  | 2.07.03.2.03.01 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi |  | Jumlah Sumber<br>Daya Perizinan<br>Lembaga<br>Pelatihan Kerja<br>Secara<br>Terintegrasi |  | N/A |  |  |  |  | 2 Perijinan | 200,000,000 | 2 Perijinan | 250,000,000 |

|  |  |                 |  |  |   |  |     |                |             |                |             |                |             |                |             |
|--|--|-----------------|--|--|---|--|-----|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|  |  | 2.07.03.2.04    | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil |  | Keluran : Jumlah Perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi produktivitas   |  | N/A | 50 Perusahaan  |             | 100 Perusahaan |             | 150 Perusahaan |             | 200 Perusahaan |             |
|  |  |                 |  |  | Hasil : Persentase Perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi produktivitas |  | N/A | 10 Persen      |             | 20 Persen      |             | 30 Persen      |             | 40 Persen      |             |
|  |  | 2.07.03.2.04.01 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil |  | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas   |  | N/A | 150 Perusahaan | 700,000,000 | 200 Perusahaan | 700,000,000 | 250 Perusahaan | 720,000,000 | 300 Perusahaan | 730,000,000 |

|  |  |                 |  |   |  |   |     |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
|--|--|-----------------|--|---|--|---|-----|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|  |  | 2.07.03.2.05    | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |   | Keluaran : jumlah tenaga kerja yang diukur produktivitasnya.   |   | N/A | 100 Tenaga Kerja |             | 120 Tenaga kerja |             | 140 Tenaga kerja |             | 160 Tenaga kerja |             |
|  |  |                 |  |   | Hasil : Persentase hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja |   | N/A | 5 Persen         |             | 10 Persen        |             | 15 Persen        |             | 20 Persen        |             |
|  |  | 2.07.03.2.05.01 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja   |   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | N/A | 100 Dokumen      | 600,000,000 | 150 Dokumen      | 600,000,000 | 200 Dokumen      | 620,000,000 | 250 Dokumen      | 630,000,000 |
|  |  | 2.07.04         | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                        | Persentase penempatan pencari kerja terdaftar |  |   | N/A | 40 Persen        |             | 40 Persen        |             | 40 Persen        |             | 40 Persen        |             |

|  |  |              |   |  |  |  |     |             |  |             |  |             |  |             |
|--|--|--------------|---|--|--|--|-----|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|
|  |  |              |   | Persentase Tenaga Kerja yang terserap melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja |  |  | N/A | 5 Persen    |  | 5 Persen    |  | 5 Persen    |  | 5 Persen    |
|  |  |              |   | Persentase lowongan kerja yang terinformasikan                                   |  |  | N/A | 50 Lowongan |  | 55 Lowongan |  | 60 Lowongan |  | 65 Lowongan |
|  |  | 2.07.04.2.01 | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | Keluaran :<br>Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pelayanan Antar Kerja        |  |  | N/A | 15000 Orang |  | 15500 Orang |  | 16000 Orang |  | 16500 Orang |
|  |  |              |   | Hasil :<br>Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelayanan Antar Kerja       |  |  | N/A | 60 Persen   |  | 70 Persen   |  | 80 Persen   |  | 90Persen    |

|  |  |                 |   |  |  |  |     |            |  |            |            |            |             |            |             |
|--|--|-----------------|---|--|--|--|-----|------------|--|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
|  |  |                 |   |  | Keluaran :<br>Jumlah Tenaga<br>Kerja Mandiri   |  | N/A | 100 Orang  |  | 350 Orang  |            | 400 Orang  |             | 450 Orang  |             |
|  |  |                 |   |  | Keluaran :<br>Jumlah Pencari<br>Kerja Disabilitas<br>yang<br>mendapatkan<br>pelayanan antar<br>kerja   |  | N/A | 2 Orang    |  | 3 Orang    |            | 4 Orang    |             | 5 Orang    |             |
|  |  |                 |   |  | Hasil :<br>Persentase<br>Hasil Program<br>Kesempatan<br>Kerja  |  | N/A | 100 Persen |  | 100 Persen |            | 100 Persen |             | 100 Persen |             |
|  |  | 2.07.04.2.01.01 | Penyediaan Sumber Daya<br>Pelayanan antar Kerja |  | Jumlah SDM<br>Pelayanan antar<br>Kerja yang<br>Mendapatkan<br>Pelatihan Melalui<br>Bimtek dan lain-<br>lain untuk<br>Peningkatan<br>Kompetensi |  | N/A |            |  | 240 Orang  | 50,000,000 | 300 Orang  | 120,000,000 | 360 Orang  | 150,000,000 |

|  |  |                 |  |  |  |  |     |             |             |              |             |             |             |             |             |
|--|--|-----------------|--|--|--|--|-----|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | 2.07.04.2.01.02 | Pelayanan antar Kerja                                    |  |  | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL                | N/A | 15000 Orang | 425,000,000 | 155000 Orang | 425,000,000 | 16000 Orang | 440,000,000 | 16500 Orang | 450,000,000 |
|  |  | 2.07.04.2.01.03 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja      |  |  | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan           | N/A |             |             | 300 Orang    | 100,000,000 | 360 Orang   | 125,000,000 | 420 Orang   | 130,000,000 |
|  |  | 2.07.04.2.01.04 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan |  |  | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD           | N/A | 50 Orang    | 60,000,000  | 50 Orang     | 70,000,000  | 50 Orang    | 80,000,000  | 50 Orang    | 90,000,000  |
|  |  | 2.07.04.2.01.05 | Perluasan Kesempatan Kerja                               |  |  | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | N/A | 100 Orang   | 110,000,000 | 350 Orang    | 105,000,000 | 400 Orang   | 130,000,000 | 450 Orang   | 140,000,000 |



|  |  |                 |  |  |  |     |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|--|-----------------|--|--|--|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | 2.07.04.2.03    | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                  |  | Keluaran :<br>Jumlah Laporan Data Pencari kerja terdaftar dan Lowongan Pekerjaan                     | N/A | 1 Laporan   |             | 1 Laporan   |             | 1 Laporan   |             | 1 Laporan   |             |
|  |  |                 |  |  | Hasil : Jumlah Data IPK yang terpublisch   | N/A | 50 Lowongan |             | 55 Lowongan |             | 60 Lowongan |             | 65 Lowongan |             |
|  |  | 2.07.04.2.03.01 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online |  | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                      | N/A | 1 Dokumen   | 400,000,000 | 1 Dokumen   | 400,000,000 | 1 Dokumen   | 430,000,000 | 1 Dokumen   | 440,000,000 |
|  |  | 2.07.04.2.03.02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online              |  | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Kairir Hub) | N/A | 80 Orang    | 300,000,000 | 80 Orang    | 300,000,000 | 80 Orang    | 330,000,000 | 80 Orang    | 340,000,000 |

|  |  |                 |   |  |  |  |     |          |          |  |  |           |             |           |             |
|--|--|-----------------|---|--|--|--|-----|----------|----------|--|--|-----------|-------------|-----------|-------------|
|  |  | 2.07.04.2.03.03 | Job Fair/Bursa Kerja  |  |  | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja          | N/A |          |          |  |  | 300 Orang | 200.000,000 | 350 Orang | 250.000,000 |
|  |  | 2.07.04.2.04    | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota |  |  | Keluaran :<br>Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan yang Diberdayakan | N/A | 40 Orang | 50 Orang |  |  | 60 Orang  |             | 70 Orang  |             |

|  |  |  |  |  |   |  |     |           |  |           |  |           |  |           |  |
|--|--|--|--|--|---|--|-----|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
|  |  |  |  |  | Keluaran :<br>Jumlah<br>Pekerja<br>Migran<br>Indonesia<br>(PMI) yang<br>mendapatkan<br>Perlindungan |  | N/A | 130 Orang |  | 150 Orang |  | 180 Orang |  | 200 Orang |  |
|  |  |  |  |  | Keluaran :<br>Jumlah<br>Pekerja<br>Migran<br>Indonesia<br>(PMI) yang<br>mendapatkan<br>Perlindungan |  | N/A | 50 Orang  |  | 50 Orang  |  | 60 Orang  |  | 60 Orang  |  |

|  |  |  |  |  |   |  |     |           |  |           |  |           |  |           |  |
|--|--|--|--|--|---|--|-----|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
|  |  |  |  |  | Keluaran :<br>Jumlah<br>Pekerja<br>Migran<br>Indonesia<br>(PMI) yang<br>mendapatkan<br>Perlindungan |  | N/A | 100 Orang |  | 100 Orang |  | 150 Orang |  | 150 Orang |  |
|  |  |  |  |  | Hasil : Jumlah<br>Pekerja Migran<br>Indonesia (PMI)<br>yang<br>ditempatkan                          |  | N/A | 10 Orang  |  | 11 Orang  |  | 12 Orang  |  | 13 Orang  |  |

|  |  |                 |  |  |  |  |     |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |
|--|--|-----------------|--|--|--|--|-----|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|  |  | 2.07.04.2.04.01 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) |  |  | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya             | N/A | 180 Orang                  | 425,000,000 | 200 Orang                  | 425,000,000 | 240 Orang                  | 460,000,000 | 260 Orang                  | 470,000,000 |
|  |  | 2.07.04.2.04.03 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan   |  |  | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan   | N/A | 40 Orang                   | 200,000,000 | 50 Orang                   | 200,000,000 | 60 Orang                   | 240,000,000 | 70 Orang                   | 260,000,000 |
|  |  | 2.07.04.2.05    | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                        |  |  | Keluaran :<br>Jumlah Realisasi Retribusi Pengguna Tenaga Kerja Asing/IMTA; | N/A | 32.000.000.000,-<br>Rupiah |             | 32.000.000.000,-<br>Rupiah |             | 34.000.000.000,-<br>Rupiah |             | 34.000.000.000,-<br>Rupiah |             |

|  |  |                 |  |   |  |   |     |                |             |                |             |                |             |                |             |
|--|--|-----------------|--|---|--|---|-----|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|  |  |                 |  |   | Hasil :<br>Persentase<br>Peningkatan<br>Realisasi<br>Retribusi<br>Pengguna<br>Tenaga Kerja<br>Asing/IMTA |   | N/A | 75 Persen      |             | 80 Persen      |             | 85 Persen      |             | 90 Persen      |             |
|  |  | 2.07.04.2.05.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |   |  | Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing yang di Koordinasikan | N/A | 300 Perusahaan | 500,000,000 | 320 Perusahaan | 500,000,000 | 350 Perusahaan | 540,000,000 | 300 Perusahaan | 560,000,000 |
|  |  | 3.32.03         | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>  | Persentase Perjanjian Kerja sama di bidang transmigrasi |  |   | N/A | 100 Persen     | 0           | 100 Persen     | 0           | 100 Persen     | 0           | 100 Persen     | 0           |

|  |  |                 |   |  |   |  |     |                |             |                |             |                |             |                |             |
|--|--|-----------------|---|--|---|--|-----|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|  |  | 3.32.03.2.01    | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                   |  | Keluaran :<br>Jumlah Masyarakat yang mengikuti program transmigrasi   |  | N/A | 100 Masyarakat |             | 200 Masyarakat |             | 300 Masyarakat |             | 400 Masyarakat |             |
|  |  |                 |   |  | Hasil Jumlah Masyarakat yang mengikuti perpindahan penduduk   |  | N/A | 5 Keluarga     |             | 5 Keluarga     |             | 5 Keluarga     |             | 5 Keluarga     |             |
|  |  | 3.32.03.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  | Jumlah laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten |  | N/A | 1 Laporan      | 375,000,000 | 1 Laporan      | 375,000,000 | 1 Laporan      | 420,000,000 | 1 Laporan      | 460,000,000 |
|  |  | 3.32.03.2.01.04 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                          |  | Jumlah Keluarga Transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan  |  | N/A | 5 Keluarga     | 85,000,000  | 5 Keluarga     | 85,000,000  | 6 Keluarga     | 95,000,000  | 7 Keluarga     | 150,000,000 |

|  |  |                 |  |  |  |  |     |                |             |                |             |                |             |                |             |
|--|--|-----------------|--|--|--|--|-----|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|  |  | 3.32.03.2.01.05 | Penyuluhan Transmigrasi  |  |  | Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan ketransmigrasian | N/A | 250 Masyarakat | 150,000,000 | 260 Masyarakat | 150,000,000 | 270 Masyarakat | 170,000,000 | 280 Masyarakat | 180,000,000 |
|  |  | 3.32.03.2.01.06 | Pelatihan Transmigrasi   |  |  | Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan                   | N/A | 10 Orang       | 50,000,000  | 10 Orang       | 55,000,000  | 10 Orang       | 60,000,000  | 10 Orang       | 65,000,000  |
|  |  | 2.07.05         | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  | Persentase Perusahaan yang memiliki syarat kerja |  |  | N/A | 2 Persen       |             | 2 Persen       |             | 2 Persen       |             | 2 Persen       |             |
|  |  | 2.07.05.2.01    | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  | Keluaran :<br>Jumlah Perusahaan yang terlayani untuk Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB |  | N/A | 200 Perusahaan |             | 300 Perusahaan |             | 400 Perusahaan |             | 500 Perusahaan |             |



|  |  |  |  |  |  |  |     |                |  |                |  |                |  |                   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------------|--|----------------|--|----------------|--|-------------------|--|
|  |  |  |  |  | Keluaran :<br>Jumlah<br>Perusahaan<br>yang<br>mendapatkan<br>sosialisasi UM      |  | N/A | 100 Perusahaan |  | 100 Perusahaan |  | 100 Perusahaan |  | 100 Perusahaan    |  |
|  |  |  |  |  | Keluaran :<br>Jumlah<br>Perusahaan<br>yang mengikuti<br>kepesertaan<br>Jamsostek |  | N/A | 200 Perusahaan |  | 300 Perusahaan |  | 400 Perusahaan |  | 500<br>Perusahaan |  |

|  |  |                 |  |  |  |  |     |                |            |                |            |                |            |                |             |
|--|--|-----------------|--|--|--|--|-----|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|
|  |  |                 |  |  | Hasil :<br>Persentase<br>Penyelesaian<br>Pelayanan<br>Pengesahan PP<br>dan Pendaftaran<br>PKB tepat waktu  |  | N/A | 40 Persen      |            | 50 Persen      |            | 60 Persen      |            | 70 Persen      |             |
|  |  |                 |  |  | Hasil :<br>Persentase<br>Penyelesaian<br>Pencegahan<br>perselisihan<br>Hubungan<br>Industrial  |  | N/A | 50 Persen      |            | 60 Persen      |            | 70 Persen      |            | 80 Persen      |             |
|  |  | 2.07.05.2.01.01 | Pengesahan Peraturan<br>Perusahaan bagi Perusahaan |  | Jumlah<br>Perusahaan yang<br>Melaksanakan<br>Pengesahan<br>Peraturan<br>Perusahaan yang<br>Terkait dengan<br>Hubungan<br>Industrial dan<br>Terdaftar di<br>WLKP Online |  | N/A | 200 Perusahaan | 50,000,000 | 225 Perusahaan | 50,000,000 | 250 Perusahaan | 70,000,000 | 250 Perusahaan | 200,000,000 |

|  |  |                 |   |  |  |   |     |                |            |                |            |                |             |                |             |
|--|--|-----------------|---|--|--|---|-----|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|  |  | 2.07.05.2.01.02 | Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan  |  |  | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama  | N/A | 100 Perusahaan | 50,000,000 | 125 Perusahaan | 50,000,000 | 150 Perusahaan | 70,000,000  | 175 Perusahaan | 200,000,000 |
|  |  | 2.07.05.2.01.03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan         |  |  | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | N/A |                |            |                |            | 1 Laporan      | 200,000,000 | 1 Laporan      | 250,000,000 |
|  |  | 2.07.05.2.02    | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota |  |  | Keluaran : Jumlah Koordinasi dengan 3 Unsur dalam lembaga kerjasama tripartit (LKS Tripartit)   | N/A | 1 Laporan      |            | 1 Laporan      |            | 1 Laporan      |             | 1 Laporan      |             |

|  |  |  |  |  |   |  |     |            |  |           |  |           |  |           |  |
|--|--|--|--|--|---|--|-----|------------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
|  |  |  |  |  | Hasil :<br>Persentase<br>Penyelesaian<br>Pelayanan<br>Pengesahan PP<br>dan Pendaftaran<br>PKB tepat waktu |  | N/A | 40 Laporan |  | 50 Persen |  | 60 Persen |  | 70 Persen |  |
|  |  |  |  |  | Hasil :<br>Persentase<br>Penyelesaian<br>Pencegahan<br>perselisihan<br>Hubungan<br>Industrial             |  | N/A | 50 Persen  |  | 60 Persen |  | 70 Persen |  | 80 Persen |  |

|  |  |                 |  |  |  |   |     |                                 |             |                                 |             |                                 |             |                                 |             |
|--|--|-----------------|--|--|--|---|-----|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|  |  | 2.07.05.2.02.01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   |  |  | Jumlah Perselisihan yang Dicegah                                | N/A | 200 Perkara                     | 300,000,000 | 190 Perkara                     | 300,000,000 | 180 Perkara                     | 320,000,000 | 170 Perkara                     | 330,000,000 |
|  |  | 2.07.05.2.02.02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |  | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan                  | N/A | 200 Perkara                     | 300,000,000 | 190 Perkara                     | 300,000,000 | 180 Perkara                     | 320,000,000 | 170 Perkara                     | 330,000,000 |
|  |  | 2.07.05.2.02.03 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi     |  |  | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | N/A | 20 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 150,000,000 | 20 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 160,000,000 | 20 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 170,000,000 | 20 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 200,000,000 |

|  |  |                 |  |  |  |   |     |            |               |            |               |            |               |            |               |
|--|--|-----------------|--|--|--|---|-----|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|  |  | 2.07.05.2.02.04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                |  |  | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina  | N/A | 3 Lembaga  | 1,530,000,000 | 3 Lembaga  | 1,500,000,000 | 3 Lembaga  | 1,600,000,000 | 3 Lembaga  | 1,600,000,000 |
|  |  | 2.07.05.2.02.05 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja |  |  | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | N/A |            |               |            |               | 200 Orang  | 100,000,000   | 250 Orang  | 200,000,000   |
|  |  | 2.07.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                       | <b>Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah</b> |  |   | N/A | 55 Point   |               | 57 Point   |               | 59 Point   |               | 61 Point   |               |
|  |  | 2.07.01.2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                  |  | Keluaran : Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan |   | N/A | 16 Dokumen |               | 16 Dokumen |               | 16 Dokumen |               | 16 Dokumen |               |

|  |  |                 |   |  |   |  |     |            |             |            |             |            |             |            |             |
|--|--|-----------------|---|--|---|--|-----|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|  |  |                 |   |  | Hasil :<br>Persentase<br>keselarasan<br>Renstra dengan<br>Rencana<br>Pembangunan<br>Daerah, Renja<br>dengan Renstra,<br>dan DPA<br>dengan Renja |  | N/A | 100 Persen |             | 100 Persen |             | 100 Persen |             | 100 Persen |             |
|  |  | 2.07.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah          |  |   | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah   | N/A | 6 Dokumen  | 120,000,000 | 6 Dokumen  | 130,000,000 | 6 Dokumen  | 140,000,000 | 6 Dokumen  | 150,000,000 |
|  |  | 2.07.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD               |  |   | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                            | N/A | 1 Dokumen  | 13,006,000  | 1 Dokumen  | 15,000,000  | 1 Dokumen  | 16,000,000  | 1 Dokumen  | 17,000,000  |
|  |  | 2.07.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD |  |   | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD | N/A | 1 Dokumen  | 9,334,000   | 1 Dokumen  | 10,000,000  | 1 Dokumen  | 15,000,000  | 1 Dokumen  | 20,000,000  |
|  |  | 2.07.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan<br>DPA-SKPD                       |  |   | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen DPA-<br>SKPD                            | N/A | 1 Dokumen  | 13,006,000  | 1 Dokumen  | 15,000,000  | 1 Dokumen  | 16,000,000  | 1 Dokumen  | 17,000,000  |

|  |  |                 |   |  |  |  |     |           |             |           |             |           |             |           |             |
|--|--|-----------------|---|--|--|--|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|  |  | 2.07.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  |  |  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | N/A | 1 Dokumen | 8,806,000   | 1 Dokumen | 10,000,000  | 1 Dokumen | 15,000,000  | 1 Dokumen | 20,000,000  |
|  |  | 2.07.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | N/A | 5 Laporan | 150,000,000 | 5 Laporan | 150,000,000 | 5 Laporan | 160,000,000 | 5 Laporan | 170,000,000 |
|  |  | 2.07.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | N/A | 1 Laporan | 70,000,000  | 1 Laporan | 80,000,000  | 1 Laporan | 85,000,000  | 1 Laporan | 90,000,000  |
|  |  | 2.07.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |  | Keluaran : Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah |  | N/A | 6 Dokumen |             | 6 Dokumen |             | 6 Dokumen |             | 6 Dokumen |             |



|  |  |                 |   |  |   |  |     |                |                |                |                |                |                |                |                |
|--|--|-----------------|---|--|---|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  |                 |   |  | Hasil :<br>Persentase<br>terpenuhinya<br>ketersediaan<br>laporan<br>keuangan<br>perangkat<br>daerah |  | N/A | 100 Persen     |                | 100 Persen     |                | 100 Persen     |                | 100 Persen     |                |
|  |  | 2.07.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | N/A | 57 Orang/bulan | 14,731,192,000 | 60 Orang/bulan | 14,831,192,000 | 65 Orang/bulan | 14,881,192,000 | 70 Orang/bulan | 14,931,192,000 |
|  |  | 2.07.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   |  |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                   | N/A | 1 Laporan      | 100,000,000    | 1 Laporan      | 100,000,000    | 1 Laporan      | 120,000,000    | 1 Laporan      | 130,000,000    |
|  |  | 2.07.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |  |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD | N/A | 5 Laporan      | 100,000,000    | 5 Laporan      | 100,000,000    | 5 Laporan      | 120,000,000    | 5 Laporan      | 130,000,000    |

|  |  |                 |   |  |  |   |     |  |  |            |            |            |             |            |             |
|--|--|-----------------|---|--|--|---|-----|--|--|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
|  |  | 2.07.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     |  | Keluaran : Tersedianya Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah |   | N/A |  |  | 1 Dokumen  |            | 1 Dokumen  |             | 1 Dokumen  |             |
|  |  |                 |   |  | Hasil : Persentase Pegawai yang Terpenuhi Administrasi Kepegawaian       |   | N/A |  |  | 100 Persen |            | 100 Persen |             | 100 Persen |             |
|  |  | 2.07.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian        | N/A |  |  |            |            | 1 Dokumen  | 100,000,000 | 1 Dokumen  | 120,000,000 |
|  |  | 2.07.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |  |  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | N/A |  |  | 160 Orang  | 50,000,000 | 160 Orang  | 100,000,000 | 160 Orang  | 100,000,000 |
|  |  | 2.07.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      |  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                | N/A |  |  |            |            | 135 Orang  | 100,000,000 | 135 Orang  | 120,000,000 |

|  |  |                 |   |  |   |  |     |            |             |            |             |            |             |            |             |
|--|--|-----------------|---|--|---|--|-----|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|  |  | 2.07.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      |  | Keluaran : Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah selama 12 bulan |  | N/A | 1 Jenis    |             | 1 Jenis    |             | 1 Jenis    |             | 1 Jenis    |             |
|  |  |                 |   |  | Hasil : Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi                          |  | N/A | 100 Persen |             | 100 Persen |             | 100 Persen |             | 100 Persen |             |
|  |  | 2.07.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |  |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | N/A | 50 Paket   | 200,000,000 | 70 Paket   | 200,000,000 | 80 Paket   | 328,771,557 | 90 Paket   | 340,000,000 |
|  |  | 2.07.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Balai Latihan Kerja) |  |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | N/A | 5 Paket    | 80,000,000  | 120 Paket  | 80,000,000  | 140 Paket  | 100,000,000 | 160 Paket  | 110,000,000 |
|  |  | 2.07.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan             | N/A | 6 Paket    | 50,000,000  | 10 Paket   | 60,000,000  | 15 Paket   | 70,000,000  | 20 Paket   | 80,000,000  |

|  |  |                 |   |  |   |   |     |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|--|-----------------|---|--|---|---|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | 2.07.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Balai Latihan Kerja)                     |  |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                  | N/A | 4 Paket     | 10,000,000  | 10 Paket    | 10,000,000  | 15 Paket    | 10,000,000  | 20 Paket    | 40,000,000  |
|  |  | 2.07.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan           | N/A | 2 Paket     | 195,000,000 | 2 Paket     | 193,778,549 | 2 Paket     | 195,000,000 | 2 Paket     | 223,514,794 |
|  |  | 2.07.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |  |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | N/A | 100 Laporan | 500,000,000 | 100 Laporan | 500,000,000 | 100 Laporan | 500,000,000 | 100 Laporan | 530,000,000 |
|  |  | 2.07.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Balai Latihan Kerja) |  |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | N/A | 30 Paket    | 25,000,000  | 30 Paket    | 25,000,000  | 30 Paket    | 40,000,000  | 30 Paket    | 50,000,000  |
|  |  | 2.07.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |  |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                | N/A | 1 Dokumen   | 100,000,000 | 1 Dokumen   | 100,000,000 | 1 Dokumen   | 100,000,000 | 1 Dokumen   | 100,000,000 |
|  |  | 2.07.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                |  | Keluaran :<br>Jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam satu tahun |   | N/A | 50 Unit     |             | 50 Unit     |             | 50 Unit     |             | 50 Unit     |             |

|  |  |                 |   |  |   |   |     |            |             |            |             |            |             |            |             |
|--|--|-----------------|---|--|---|---|-----|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|  |  |                 |   |  | Hasil :<br>Persentase barang milik daerah yang diadakan sesuai dengan rencana kebutuhan barang        |   | N/A | 100 Persen |             | 100 Persen |             | 100 Persen |             | 100 Persen |             |
|  |  | 2.07.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                           |  |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | N/A | 50 Unit    | 500,000,000 | 50 Unit    | 500,000,000 | 50 Unit    | 500,000,000 | 50 Unit    | 500,000,000 |
|  |  | 2.07.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Balai Lathan Kerja) |  |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | N/A |            |             |            |             | 10 Unit    | 50,000,000  | 12 Unit    | 300,000,000 |
|  |  | 2.07.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            |  | Keluaran :<br>Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah selama 12 bulan |   | N/A | 1 Jenis    |             | 1 Jenis    |             | 1 Jenis    |             | 1 Jenis    |             |

|  |  |                 |  |  |  |  |     |            |             |            |             |            |             |            |             |
|--|--|-----------------|--|--|--|--|-----|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|  |  |                 |  |  | Hasil : Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah yang terpenuhi |  | N/A | 100 Persen |             | 100 Persen |             | 100 Persen |             | 100 Persen |             |
|  |  | 2.07.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | N/A | 14 Laporan | 600,000,000 | 14 Laporan | 500,000,000 | 15 Laporan | 500,000,000 | 18 Laporan | 630,000,000 |
|  |  | 2.07.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Balai Latihan Kerja)                   |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | N/A | 26 Laporan | 950,000,000 | 12 Laporan | 950,000,000 | 15 Laporan | 950,000,000 | 18 Laporan | 950,000,000 |
|  |  | 2.07.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Balai Latihan Kerja) |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | N/A | 12 Laporan | 180,000,000 | 12 Laporan | 180,000,000 | 12 Laporan | 180,000,000 | 12 Laporan | 180,000,000 |
|  |  | 2.07.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |  | Keluaran : Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dalam setahun                        |  | N/A | 66 Unit    |             | 66 Unit    |             | 66 Unit    |             | 66 Unit    |             |

|  |  |                 |   |  |  |  |     |            |             |            |             |            |             |            |             |
|--|--|-----------------|---|--|--|--|-----|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|  |  |                 |   |  | Hasil :<br>Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik |  | N/A | 100 Persen |             | 100 Persen |             | 100 Persen |             | 100 Persen |             |
|  |  | 2.07.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                            |  |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | N/A | 20 Unit    | 150,000,000 | 30 Unit    | 150,000,000 | 40 Unit    | 150,000,000 | 50 Unit    | 180,000,000 |
|  |  | 2.07.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPTD Balai Latihan Kerja) |  |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | N/A | 2 Unit     | 15,000,000  | 5 Unit     | 15,000,000  | 8 Unit     | 15,000,000  | 10 Unit    | 40,000,000  |
|  |  | 2.07.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | N/A | 20 Unit    | 100,000,000 | 25 Unit    | 100,000,000 | 30 Unit    | 120,000,000 | 40 Unit    | 130,000,000 |
|  |  | 2.07.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Balai Latihan Kerja)   |  |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | N/A | 5 Unit     | 26,350,000  | 10 Unit    | 26,350,000  | 15 Unit    | 26,350,000  | 20 Unit    | 50,000,000  |

|               |  |                 |   |  |  |   |     |         |                       |          |                       |          |                       |          |                       |
|---------------|--|-----------------|---|--|--|---|-----|---------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|
|               |  | 2.07.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                            |  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | N/A | 46 Unit | 200,000,000           | 100 Unit | 200,000,000           | 150 Unit | 200,000,000           | 200 Unit | 230,000,000           |
|               |  | 2.07.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD Balai Latihan Kerja) |  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | N/A |         |                       | 8 Unit   | 50,000,000            | 10 Unit  | 60,000,000            | 12 Unit  | 100,000,000           |
| <b>Jumlah</b> |  |                 |   |  |  |   |     |         | <b>30,838,384,000</b> |          | <b>30,727,010,549</b> |          | <b>33,153,313,557</b> |          | <b>34,823,706,794</b> |



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETENAGAKERJAAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renstra Dinas Ketenagakerjaan adalah perencanaan strategis SKPD yang merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lainnya seperti Pola Dasar, Propeda dan RPJMP, yang dijabarkan lebih spesifik sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi.

Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan disusun berdasarkan alur pikir yang dimulai peraturan yang mengikat terkait penyusunan perencanaan rencana strategis dan berbagai masukan dari stakeholder. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama, maka dibuatlah arah kebijakan dan program-program kegiatan untuk mendukung Renstra Tahun 2023-2026.

Menganalisa Program dan Kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 maka terdapat isu-isu lingkungan strategis pembangunan ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas dan kualitas angkatan kerja melalui transformasi pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
2. Penyediaan layanan pasar kerja sebagai fasilitasi link and match antara penawaran dan permintaan tenaga kerja;
3. Perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda dan memberi akses menjadi tenaga kerja mandiri formal;
4. Pengembangan talenta muda di industri kreatif pada pekerjaan yang akan berkembang pada masa depan;
5. Perluasan pasar kerja formal luar negeri bagi pekerja migran Indonesia;
6. Pengembangan hubungan industrial yang adaptif terhadap perkembangan dunia kerja dan menjamin kesejahteraan pekerja yang berkesinambungan;
7. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pemberi kerja melalui reformasi dan digitalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan;
8. Percepatan perubahan ekosistem digital layanan ketenagakerjaan;
9. Penata kelolaan pemerintahan, pengawasan internal dan percepatan reformasi birokrasi dengan mengarusutamakan integrasi teknologi digital ke dalam bisnis proses kementerian menuju digital era governance.

dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Melihat aturan tersebut perkembangan yang tersebut di atas, pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian menitikberatkan pada :

- a. Peningkatan daya saing tenaga kerja;
- b. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa,
- c. Perluasan kesempatan kerja, peningkatan pelayanan kesempatan kerja dan pelayanan informasi bursa kerja;
- d. Peningkatan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan serta bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat;
- e. Peningkatan dan pengembangan kemampuan serta keterampilan wirausaha muda,
- f. Pendukung terhadap terwujudnya kerjasama antardaerah bidang ketransmigrasian melalui Forum KIE Transmigrasi; dan
- g. Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat transmigrasi.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, serta kondisi masa depan yang terus berubah dengan adanya era disrupsi dapat mendatangkan begitu banyak peluang sekaligus ancaman jika tidak mempersiapkannya. Era revolusi industri 4.0 yang saat ini sedang berlangsung dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi robot dan teknologi informasi, dan komunikasi dan ditunjang dengan perkembangan ekonomi digital yang digambarkan dengan semakin maraknya berkembang bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan ataupun antar individu menjadi tantangan besar bagi dunia ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Tren Demografis:

1. Bonus Demografi
2. Hilangnya beberapa profesi di masa depan
3. Minta pada pelatihan vokasional;
4. Daya Tarik PNS Tinggi
5. Rendahnya Kesadaran Sertifikasi Kompetensi
6. Mismatch pendidikan dan Kebutuhan Industri
7. Tingginya angka pengangguran baik dari lulusan S1 maupun SMK
8. Upah Rendah
9. Tenaga kerja Tidak Kompeten
10. Minat Wirausaha Rendah
11. Rendahnya keinginan bekerja di luar negeri
12. Penggunaan Teknologi semakin Tinggi
13. Kurikulum SMA belum mengatur arah minat murid
14. Pertumbuhan Penduduk Tinggi
15. Kesempatan kerja Kompetitif dan Terbatas
16. Pendidikan sejak Usia Dini

**Tabel 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023**

| No | Program   | Indikator  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD 0 Tahun | Satuan   | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD |
|----|---|--|------------------------------------|----------|-----------------------------|------|------|------|-----------------------------|
|    |   |  |                                    |          | 2023                        | 2024 | 2025 | 2026 |                             |
| 1  | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja      | Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan                              | N/A                                | Persen   | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100                         |
|    |   | Persentase Pelatihan Angkatan Kerja Berbasis Kompetensi                          | N/A                                | Persen   | 10                          | 20   | 30   | 40   | 40                          |
|    |   | Persentase Perusahaan kecil yang ditingkatkan produktivitasnya                   | N/A                                | Persen   | 50                          | 60   | 70   | 80   | 80                          |
| 2  | Program Penempatan Tenaga Kerja                             | Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar                                    | N/A                                | Persen   | 40                          | 40   | 40   | 40   | 40                          |
|    |   | Persentase Tenaga Kerja yang Terserap melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja | N/A                                | Persen   | 5                           | 5    | 5    | 5    | 5                           |
|    |   | Persentase Lowongan Kerja yang Terinformasikan                                   | N/A                                | Lowongan | 50                          | 55   | 60   | 65   | 65                          |
| 3  | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi                    | Persentase Perjanjian Kerja Sama di Bidang Transmigrasi                          | N/A                                | Persen   | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100                         |
| 4  | Program Hubungan Industrial                                 | Persentase Perusahaan yang memiliki Syarat Kerja                                 | N/A                                | Persen   | 2                           | 2    | 2    | 2    | 2                           |
| 5  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                      | N/A                                | Point    | 55                          | 57   | 59   | 61   | 61                          |

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETENAGAKERJAAN

Rencana program dan kegiatan disusun untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan. Untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan, terdiri dari program pilihan dan program wajib :

#### A. Urusan Pemerintahan Pilihan

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 84 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, maka urusan pilihan untuk yang akan dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi selama periode 2023-2026 dilakukan **melalui Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.**

#### B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi maka pelaksanaan program/kegiatannya urusan wajib diwadahi kedalam program program berikut ini:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan kebutuhan anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi membutuhkan dana dari tahun 2023-2026 mencapai Rp. **129.542.414.900,-** (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

**Tabel 6 Tabel Kebutuhan Anggaran 2023-2026**

| No. | Tahun | Pagu Anggaran (Rp) |
|-----|-------|--------------------|
| 1   | 2023  | 30.838.384.000,-   |
| 2   | 2024  | 30.727.010.549,-   |

|        |      |                   |
|--------|------|-------------------|
| 3      | 2025 | 33.153.313.557,-  |
| 4      | 2026 | 34.823.706.794,-  |
| Jumlah |      | 129.542.414.900,- |

Tabel 7 Rencana Kerja 2023

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja  |                       |                   | Rencana Tahun 2023  |  |   |  |                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                        |           |  |                              |  |            |             |
|------|--|--------------------|-----------------------|-------------------|---|--|---|--|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|--|------------------------------|--|------------|-------------|
|      |  | Capaian<br>Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan  | Target Capaian Kinerja                   |   |  | Pagu Indikatif<br>(Rp.)      | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja |           | Kebutuhan<br>Dana/ Pagu<br>Indikatif (Rp.) |                              |  |            |             |
|      |  |                    |                       |                   |   | Program                                  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan                            |                              |                                   | Tolok Ukur             | Target    |  |                              |  |            |             |
| 2    |  |                    |                       |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |   |  |                              |                                   |                        |           |  |                              |  |            |             |
| 2    | 07   |                    |                       |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                               |  |   |  |                              |                                   |                        |           |  |                              |  |            |             |
| 2    | 07   | 01                 |                       |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |  |   |  |                              |                                   |                        |           |  |                              |  |            |             |
| 2    | 07   | 01                 | 2.01                  |                   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |  |   |  |                              |                                   |                        |           |  |                              |  |            |             |
| 2    | 07   | 01                 | 2.01                  |                   | 384,152,000   |  |   |  |                              |                                   |                        |           |  |                              |  |            |             |
| 2    | 07   | 01                 | 2.01                  | 01                | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, | 100 Persen                        | 1 Dokumen              | 9 Dokumen | 120,000,000                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 120,000,000 |
| 2    | 07   | 01                 | 2.01                  | 02                | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                            | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, | 100 Persen                        | 1 Dokumen              | 9 Dokumen | 13,006,000                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 13,006,000  |
| 2    | 07   | 01                 | 2.01                  | 03                | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                 | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, | 100 Persen                        | 1 Dokumen              | 9 Dokumen | 9,334,000                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 9,334,000   |
| 2    | 07   | 01                 | 2.01                  | 04                | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                    | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, | 100 Persen                        | 1 Dokumen              | 9 Dokumen | 13,006,000                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 13,006,000  |
| 2    | 07   | 01                 | 2.01                  | 05                | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                         | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, | 100 Persen                        | 1 Dokumen              | 9 Dokumen | 8,806,000                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 8,806,000   |

|   |    |    |      |   |   |  |   |   |                                       |            |              |             |                |                              |  |            |                |
|---|----|----|------|---|---|--|---|---|---------------------------------------|------------|--------------|-------------|----------------|------------------------------|--|------------|----------------|
| 2 | 0  | 0  | 2.0  | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi | 100 Persen | 1 Laporan    | 9 Dokumen   | 150,000,000    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                       | 100 Persen | 150,000,000    |
| 2 | 0  | 0  | 2.0  | 0 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Cakupan Layanan Administrasi                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Tersusunnya Dokumen Perencanaan                                       | Kab. Bekasi, Cikarang                 | 100 Persen | 3 Laporan    | 9 Dokumen   | 70,000,000     | PENDAPATAN ASLI DAERAH       | Cakupan Layanan Administrasi                                   | 100 Persen | 70,000,000     |
| 2 | 07 | 01 | 2.02 |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |  |   |   |                                       |            |              |             | 14,931,192,000 |                              |  |            | 14,931,192,000 |
| 2 | 0  | 0  | 2.0  | 0 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | Tersusunnya Dokumen Keuangan  | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi | 100 Persen | 57 Orang/bul | an6 Dokumen | 14,731,192,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja              | 100 Persen | 14,731,192,000 |
| 2 | 0  | 0  | 2.0  | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja              | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun   | Tersusunnya Dokumen Keuangan  | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi | 100 Persen | 1 Laporan    | 6 Dokumen   | 100,000,000    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja              | 100 Persen | 100,000,000    |
| 2 | 0  | 0  | 2.0  | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD        | Tersusunnya Dokumen Keuangan  | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi | 100 Persen | 5 Laporan    | 6 Dokumen   | 100,000,000    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 Persen | 100,000,000    |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah  |  |   |   |                                       |            |              |             | 1,045,000,000  |                              |  |            | 1,045,000,000  |
| 2 | 0  | 0  | 2.0  | 0 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Cakupan Layanan Administrasi                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | Meningkatnya Pelayanan Administrasi                                   | Kab. Bekasi, Cikarang                 | 100 Persen | 64 Paket     | 100 persen  | 200,000,000    | PENDAPATAN ASLI DAERAH       | Cakupan Layanan Administrasi                                   | 100 Persen | 200,000,000    |

|   |    |    |      |    |   |   |  |   |                                       |            |             |            |             |                              |   |            |             |             |             |
|---|----|----|------|----|---|---|--|---|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Cakupan Layanan Administrasi                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Meningkatnya Pelayanan Administrasi   | Kab. Bekasi, Cikarang                 | 100 Persen | 6 Paket     | 100 persen | 50,000,000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Layanan Administrasi                                | 100 Persen | 50,000,000  |             |             |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Cakupan Layanan Administrasi                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Meningkatnya Pelayanan Administrasi   | Kab. Bekasi, Cikarang                 | 100 Persen | 2 Paket     | 100 persen | 195,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Layanan Administrasi                                | 100 Persen | 195,000,000 |             |             |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Cakupan Layanan Administrasi                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | Meningkatnya Pelayanan Administrasi   | Kab. Bekasi, Cikarang                 | 100 Persen | 100 Laporan | 100 persen | 500,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Layanan Administrasi                                | 100 Persen | 500,000,000 |             |             |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Cakupan Layanan Administrasi                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Meningkatnya Pelayanan Administrasi   | Kab. Bekasi, Cikarang                 | 100 Persen | 1 Dokumen   | 100 persen | 100,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Layanan Administrasi                                | 100 Persen | 100,000,000 |             |             |
| 2 | 07 | 01 | 2.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   |  |   |                                       |            |             |            |             |                              |   |            | 500,000,000 | 500,000,000 |             |
| 2 | 07 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Cakupan Layanan Administrasi                                | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | Meningkatnya Pelayanan Administrasi   | Kab. Bekasi, Cikarang                 | 100 Persen | 50 Unit     | 100 persen | 500,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Layanan Administrasi                                | 100 Persen | 500,000,000 |             |             |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |   |  |   |                                       |            |             |            |             |                              |   |            |             | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran                                   | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat,          | 100 Persen | 14 Laporan  | 100 persen | 600,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                    | 100 Persen | 600,000,000 |             |             |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |  |   |                                       |            |             |            |             |                              |   |            |             | 450,000,000 | 450,000,000 |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Tersedianya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Sarana Prasarana Gedung Kantor | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi | 100 Persen | 20 Unit     | 66 Unit    | 150,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 100 Persen | 150,000,000 |             |             |



|   |    |    |      |    |  |   |  |   |  |                                 |             |             |               |                              |   |                                 |               |
|---|----|----|------|----|--|---|--|---|--|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------|---|---------------------------------|---------------|
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Tersedianya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan  | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi        | 100 Persen                      | 20 Unit     | 66 Unit     | 100,000,000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik   | 100 Persen                      | 100,000,000   |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Tersedianya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan  | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi        | 100 Persen                      | 46 Unit     | 66 Unit     | 200,000,000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik   | 100 Persen                      | 200,000,000   |
| 2 | 07 | 03 |      |    | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA   |   |  |   |  |                                 |             |             | 3,800,000,000 |                              | 3,800,000,000   |                                 |               |
| 2 | 07 | 03 | 2.01 |    | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  |   |  |   |  |                                 |             |             | 1,750,000,000 |                              | 1,750,000,000   |                                 |               |
| 2 | 07 | 03 | 2.01 | 11 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah lembaga ketenagakerjaan yang terakreditasi<br>Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan konsultasi produktivitas<br>Persentase pelatihan angkatan kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n                   | Pencari Kerja yang mendapatkan Pendidikan, Pelatihan Keterampilan dan yang tersertifikasi | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Semua Kelurahan | 3 LPK<br>200 Orang<br>30 Persen | 312 Orang   | 436 Orang   | 1,750,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah lembaga ketenagakerjaan yang terakreditasi<br>Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan konsultasi produktivitas<br>Persentase pelatihan angkatan kerja | 3 LPK<br>200 Orang<br>30 Persen | 1,750,000,000 |
| 2 | 07 | 03 | 2.02 |    | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta   |   |  |   |  |                                 |             |             | 750,000,000   |                              | 750,000,000   |                                 |               |
| 2 | 07 | 03 | 2.02 | 11 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta   | Jumlah lembaga ketenagakerjaan yang terakreditasi   | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina  | Meningkatnya Peran Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan perusahaan                          | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi        | 150 LPK                         | 150 Lembaga | 150 Laporan | 750,000,000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah lembaga ketenagakerjaan yang terakreditasi   | 150 LPK                         | 750,000,000   |
| 2 | 07 | 03 | 2.04 |    | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil   |   |  |   |  |                                 |             |             | 700,000,000   |                              | 700,000,000   |                                 |               |



|   |    |    |      |    |  |   |  |  |                                       |                                     |             |             |             |                              |   |                                     |             |
|---|----|----|------|----|--|---|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| 2 | 07 | 04 | 2.01 | 04 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan           | Jumlah Informasi lowongan pekerjaan yang di publis<br>Jumlah kaum difabel yang mendapatkan pekerjaan<br>Presentase penempatan                         | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD           | Tersedianya Penyediaan Pelayanan Antarkerja di Daerah                  | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi | 100 Formasi<br>2 Orang<br>40 Persen | 50 Orang    | 15640 Orang | 60,000,000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Informasi lowongan pekerjaan yang di publis<br>Jumlah kaum difabel yang mendapatkan pekerjaan<br>Presentase penempatan                         | 100 Formasi<br>2 Orang<br>40 Persen | 60,000,000  |
| 2 | 07 | 04 | 2.01 | 05 | Perluasan Kesempatan Kerja   | Jumlah Informasi lowongan pekerjaan yang di publis<br>Jumlah kaum difabel yang mendapatkan pekerjaan<br>Presentase penempatan pencari kerja terdaftar | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | Tersedianya Penyediaan Pelayanan Antarkerja di Daerah                  | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi | 100 Formasi<br>2 Orang<br>40 Persen | 100 Orang   | 15640 Orang | 110,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Informasi lowongan pekerjaan yang di publis<br>Jumlah kaum difabel yang mendapatkan pekerjaan<br>Presentase penempatan pencari kerja terdaftar | 100 Formasi<br>2 Orang<br>40 Persen | 110,000,000 |
| 2 | 07 | 04 | 2.03 |    | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                  |   |  |  |                                       |                                     |             |             | 700,000,000 |                              |   | 700,000,000                         |             |
| 2 | 07 | 04 | 2.03 | 01 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Informasi lowongan pekerjaan yang di publis  | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online  | terciptanya Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online untuk Perusahaan dan | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi | 1000 lowong                         | an1 Dokumen | 1 Laporan   | 400,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Informasi lowongan pekerjaan yang di publis  | 1000 lowongan                       | 400,000,000 |

|      |    |    |      |   |  |  |   |   |                                       |               |                |                  |                                   |                              |  |               |             |
|------|----|----|------|---|--|--|---|---|---------------------------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|---------------|-------------|
| 2    | 07 | 04 | 2.04 |   | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online  | Jumlah Informasi lowongan pekerjaan yang di publis | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | terciptanya Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online untuk   | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi | 1000 lowongan | an130 Orang    | 1 Laporan        | 300,000,000                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Informasi lowongan pekerjaan yang di publis | 1000 lowongan | 300,000,000 |
| 2    | 07 | 04 | 2.04 |   | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota  |  |   |   |                                       |               |                |                  | 625,000,000                       |                              |  | 625,000,000   |             |
| 2    | 07 | 04 | 2.04 | 1 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Presentase penempatan pencari kerja terdaftar      | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya                                      | Meningkatnya Perlindungan dan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia   | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi | 40 Persen     | 170 Orang      | 170 Orang        | 425,000,000                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Presentase penempatan pencari kerja terdaftar      | 40 Persen     | 425,000,000 |
| 2    | 07 | 04 | 2.04 | 3 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan   | Presentase penempatan pencari kerja terdaftar      | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan  | Meningkatnya Perlindungan dan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia   | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi | 40 Persen     | 20 Orang       | 170 Orang        | 200,000,000                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Presentase penempatan pencari kerja terdaftar      | 40 Persen     | 200,000,000 |
| 2    | 07 | 04 | 2.05 |   | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                        |  |   |   |                                       |               |                |                  | 500,000,000                       |                              |  | 500,000,000   |             |
| 2    | 07 | 04 | 2.05 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota       | Presentase penempatan pencari kerja terdaftar      | Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing yang di Koordinasikan                                 | Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi | 40 Persen     | 500 Perusahaan | an210 Perusahaan | an 500,000,000                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Presentase penempatan pencari kerja terdaftar      | 40 Persen     | 500,000,000 |
| Kode |    |    |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub  | Indikator Kinerja                                  |   |   | Rencana Tahun 2023                    |               |                |                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                              |  |               |             |
|      |    |    |      |   | Capaian  | Keluaran Sub Kegiatan                              | Hasil   | Lokasi  | Target Capaian Kinerja                |               | Pagu Indikatif | Sumber Dana      | Target Capaian Kinerja            |                              | Kebutuhan  |               |             |

|   |    |    |      |    | Kegiatan   | Program   |  | Kegiatan  | Output Kegiatan                       | Program                        | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan   | (Rp.)          |                              | Tolok Ukur  | Target                         | Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |               |               |
|---|----|----|------|----|--|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 2 | 07 | 05 |      |    | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  |   |  |   |                                       |                                |                       |                  |                |                              |   |                                |                            | 2,380,000,000 | 2,380,000,000 |
| 2 | 07 | 05 | 2.01 |    | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota           |   |  |   |                                       |                                |                       |                  |                |                              |   |                                |                            | 100,000,000   | 100,000,000   |
| 2 | 07 | 05 | 2.01 | 01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan  | Jumlah penyelesaian perselisihan pengusaha-pekerja per tahun<br>Rekomendasi Kepala Daerah             | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang disahkan | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi | 200 Perselisihan 1 Rekomendasi | an 200 Perusahaan     | an100 Perusahaan | an 50,000,000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah penyelesaian perselisihan pengusaha-pekerja per tahun<br>Rekomendasi Kepala Daerah             | 200 Perselisihan 1 Rekomendasi | 50,000,000                 |               |               |
| 2 | 07 | 05 | 2.01 | 02 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan  | Jumlah penyelesaian perselisihan pengusaha-pekerja per tahun<br>Rekomendasi Kepala Daerah             | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama   | Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang disahkan | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi | 200 Perselisihan 1 Rekomendasi | an 300 Perusahaan     | an100 Perusahaan | an 50,000,000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah penyelesaian perselisihan pengusaha-pekerja per tahun<br>Rekomendasi Kepala Daerah             | 200 Perselisihan 1 Rekomendasi | 50,000,000                 |               |               |
| 2 | 07 | 05 | 2.02 |    | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                    |   |  |   |                                       |                                |                       |                  |                |                              |   |                                |                            | 2,280,000,000 | 2,280,000,000 |
| 2 | 07 | 05 | 2.02 | 01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian perselisihan pengusaha-pekerja per tahun<br>Rekomendasi Kepala Daerah tentang UMK | Jumlah Perselisihan yang Dicegah   | Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial    | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi | 200 Perselisihan 1 Rekomendasi | an 200 Perkara        | 200 Perselisi h  | an 300,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah penyelesaian perselisihan pengusaha-pekerja per tahun<br>Rekomendasi Kepala Daerah tentang UMK | 200 Perselisihan 1 Rekomendasi | 300,000,000                |               |               |

|   |    |    |      |    |  |  |   |  |                                       |                                |                   |                 |                  |                              |  |                                |               |             |
|---|----|----|------|----|--|--|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|---------------|-------------|
| 2 | 07 | 05 | 2.02 | 02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian perselisihan pengusaha-pekerja per tahun Rekomendasi Kepala Daerah tentang UMK | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan                  | Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi | 200 Perselisihan 1 Rekomendasi | an 200 Perkara si | 200 Perselisi h | an 300,000,000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah penyelesaian perselisihan pengusaha-pekerja per tahun Rekomendasi Kepala Daerah tentang UMK | 200 Perselisihan 1 Rekomendasi | 300,000,000   |             |
| 2 | 07 | 05 | 2.02 | 03 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi     | Jumlah penyelesaian perselisihan pengusaha-pekerja per tahun Rekomendasi Kepala Daerah tentang UMK | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi | 200 Perselisihan 1 Rekomendasi | an 3 Asosiasi si  | 200 Perselisi h | an 150,000,000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah penyelesaian perselisihan pengusaha-pekerja per tahun Rekomendasi Kepala Daerah tentang UMK | 200 Perselisihan 1 Rekomendasi | 150,000,000   |             |
| 2 | 07 | 05 | 2.02 | 04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah penyelesaian perselisihan pengusaha-pekerja per tahun Rekomendasi Kepala Daerah             | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina                                | Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi | 200 Perselisihan 1 Rekomendasi | an 3 Lembaga si   | 200 Perselisi h | an 1,530,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah penyelesaian perselisihan pengusaha-pekerja per tahun Rekomendasi Kepala Daerah             | 200 Perselisihan 1 Rekomendasi | 1,530,000,000 |             |
| 3 |    |    |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  |  |   |  |                                       |                                |                   |                 |                  |                              |  |                                |               |             |
| 3 | 32 |    |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI  |  |   |  |                                       |                                |                   |                 |                  |                              |  |                                | 660,000,000   | 660,000,000 |
| 3 | 32 | 03 |      |    | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI   |  |   |  |                                       |                                |                   |                 |                  |                              |  |                                | 660,000,000   | 660,000,000 |
| 3 | 32 | 03 | 2.01 |    | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  |  |   |  |                                       |                                |                   |                 |                  |                              |  |                                | 660,000,000   | 660,000,000 |

|       |   |   |   |                                    |  |   |   |   |   |            |                     |            |                |                              |   |            |               |  |               |
|-------|---|---|---|------------------------------------|--|---|---|---|---|------------|---------------------|------------|----------------|------------------------------|---|------------|---------------|--|---------------|
| 3     | 3<br>2  | 0<br>3                                  | 2.0<br>1  | 0<br>1                             | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Masyarakat yang mengikuti perpindahan penduduk | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pemindahan Penduduk Kabupaten Bekasi            | Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4 Keluarga | 1 Laporan           | 4 Keluarga | 375,000,000    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Masyarakat yang mengikuti perpindahan penduduk | 4 Keluarga | 375,000,000   |  |               |
| 3     | 3<br>2  | 0<br>3                                  | 2.0<br>1  | 0<br>4                             | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah Masyarakat yang mengikuti perpindahan penduduk | Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan   | Pemindahan Penduduk Kabupaten Bekasi            | Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua           | 4 Keluarga | 4 Kepala Keluarga   | 4 Keluarga | 85,000,000     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Masyarakat yang mengikuti perpindahan penduduk | 4 Keluarga | 85,000,000    |  |               |
| 3     | 3<br>2  | 0<br>3                                  | 2.0<br>1  | 0<br>5                             | Penyuluhan Transmigrasi  | Jumlah Masyarakat yang mengikuti perpindahan penduduk | Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan  | Pemindahan Penduduk Kabupaten Bekasi            | Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua           | 4 Keluarga | 300 Kepala Keluarga | 4 Keluarga | 150,000,000    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Masyarakat yang mengikuti perpindahan penduduk | 4 Keluarga | 150,000,000   |  |               |
| 3     | 3<br>2  | 0<br>3                                  | 2.0<br>1  | 0<br>6                             | Pelatihan Transmigrasi   | Jumlah Masyarakat yang mengikuti perpindahan penduduk | Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan  | Pemindahan Penduduk Kabupaten Bekasi            | Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua           | 4 Keluarga | 50 Orang            | 4 Keluarga | 50,000,000     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Masyarakat yang mengikuti perpindahan penduduk | 4 Keluarga | 50,000,000    |  |               |
| TOTAL |   |   |   |                                    |  |   |   |   |   |            |                     |            | 27,170,344,000 |                              | 27,170,344,000  |            |               |  |               |
| 2     | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |   |                                    |  |   |   |   |   |            |                     |            |                |                              |   |            |               |  |               |
| 2     | 07  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA |   |                                    |  |   |   |   |   |            |                     |            |                |                              |   |            | 3,668,040,000 |  | 3,668,040,000 |
| 2     | 07  | 01                                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                    |  |   |   |   |   |            |                     |            |                |                              |   |            | 1,286,350,000 |  | 1,286,350,000 |
| 2     | 07  | 01                                      | 2.06  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |   |   |   |   |            |                     |            |                |                              |   |            | 115,000,000   |  | 115,000,000   |
| 2     | 07  | 01                                      | 2.06  | 02                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kab. Bekasi, Tambun Utara, Srimahi            | 100 Persen | 5 Paket             | 100 persen | 80,000,000     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran              | 100 Persen | 80,000,000    |  |               |

|   |    |    |      |    |   |   |  |   |                                       |            |            |            |               |                              |   |               |             |
|---|----|----|------|----|---|---|--|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------|---|---------------|-------------|
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran                                   | Kab. Bekasi, Tambun Utara, Srimahi    | 100 Persen | 4 Paket    | 100 persen | 10,000,000    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                    | 100 Persen    | 10,000,000  |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran                                   | Kab. Bekasi, Tambun Utara, Srimahi    | 100 Persen | 30 Laporan | 100 persen | 25,000,000    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                    | 100 Persen    | 25,000,000  |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |   |  |   |                                       |            |            |            | 1,130,000,000 |                              |   | 1,130,000,000 |             |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran                                   | Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi | 100 Persen | 12 Laporan | 100 persen | 180,000,000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                    | 100 Persen    | 180,000,000 |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran                                   | Kab. Bekasi, Tambun Utara, Srimahi    | 100 Persen | 26 Laporan | 100 persen | 950,000,000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                    | 100 Persen    | 950,000,000 |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |  |   |                                       |            |            |            | 41,350,000    |                              |   | 41,350,000    |             |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Tersedianya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Sarana Prasarana Gedung Kantor | Kab. Bekasi, Tambun Utara, Srimahi    | 100 Persen | 2 Unit     | 9 Unit     | 15,000,000    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 100 Persen    | 15,000,000  |



|       |    |    |      |    |  |   |  |   |                                    |            |           |           |               |                              |   |            |               |
|-------|----|----|------|----|--|---|--|---|------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------------------------|---|------------|---------------|
| 2     | 07 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                           | Tersedianya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan                          | Kab. Bekasi, Tambun Utara, Srimahi | 100 Persen | 5 Unit    | 9 Unit    | 26,350,000    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 100 Persen | 26,350,000    |
| 2     | 07 | 03 |      |    | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA   |   |  |   |                                    |            |           |           | 2,381,690,000 |                              | 2,381,690,000   |            |               |
| 2     | 07 | 03 | 2.01 |    | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  |   |  |   |                                    |            |           |           | 2,381,690,000 |                              | 2,381,690,000   |            |               |
| 2     | 07 | 03 | 2.01 | 01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Persentase pelatihan angkatan kerja berbasis kompetensi     | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan | Kab. Bekasi, Tambun Utara, Srimahi | 30 Persen  | 144 Orang | 144 Orang | 2,136,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase pelatihan angkatan kerja berbasis kompetensi     | 30 Persen  | 2,136,000,000 |
| 2     | 07 | 03 | 2.01 | 03 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota  | Persentase pelatihan angkatan kerja berbasis                | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja                     | Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pendidikan dan                        | Kab. Bekasi, Tambun Utara,         | 30 Persen  | 16 Unit   | 144 Orang | 245,690,000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase pelatihan angkatan kerja berbasis                | 30 Persen  | 245,690,000   |
| TOTAL |    |    |      |    |  |   |  |   |                                    |            |           |           | 3,668,040,000 |                              | 3,668,040,000   |            |               |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi pada Tahun 2023 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasakran pada lintas program dan usulan masyarakat melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan Pembangunan Kabupaten Bekasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Tahun 2023 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparaturnya pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dimasa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan ataupun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian scenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Semoga Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder terkait, sehingga diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan yang berarti dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di tahun yang akan datang. Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KABUPATEN BEKASI**

**Drs. H. EDI ROCHYADI, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 196409061986031012